

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

Dua berita yang diteliti merupakan berita terkait kasus korupsi benih lobster oleh Menteri KKP Edhy Prabowo. Yang pertama yang berjudul “Edhy Prabowo Siap Dihukum Mati karena Korupsi Benur, KPK Bocorkan Langkah yang Telah Ditempuh” yang ditulis oleh wartawan yang Bernama Nopsi Marga dalam media *online* Pikiran Rakyat menginformasikan terkait proses hukum yang dilakukan oleh KPK.

Disebutkan dalam berita tersebut, Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo terbukti bersalah karena telah melakukan penyelewengan kekuasaan berupa tindak pidana korupsi ekspor benih lobster. Edhy Prabowo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada 25 November 2020 lalu di Bandara Soekarno Hatta. Di dalam narasi berita tersebut, Pikiran Rakyat menampilkan beberapa alat bukti yang disinyalir sebagai hasil dari tindak pidana korupsi tersebut. Kemudian, ada beberapa pihak yang terlibat dalam penyelewengan kekuasaan tersebut yang kemudian digiring untuk melakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Edhy Prabowo merupakan salah satu menteri yang mengaku akan menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan jujur. Namun ternyata, kenyataan malah berbalik sebaliknya dengan ditemukannya beberapa bukti Edhy Prabowo

menerima suap dalam ekspor bisnis benih lobster. Pada saat diwawancarai pada tanggal 22 Februari 2021, Edhy mengungkapkan bahwa dirinya siap untuk dihukum mati jika KPK memberikan hukuman tersebut. Disamping hal tersebut, Edhy melakukan pembelaan diri dengan mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan tugasnya dengan baik di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Adapun isi berita yang terdapat dalam media tersebut adalah sebagai berikut:

Edhy Prabowo Siap Dihukum Mati karena Korupsi Benur, KPK

Bocorkan Langkah yang Telah Ditempuh

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat ini masih menjalani hukuman, setelah terbukti bersalah dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster (benur).

Edhy Prabowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Rabu, 25 November 2020 dini hari, di Bandara Soekarno-Hatta, sepulang dari Amerika Serikat.

KPK juga mengamankan Iis Rosiyati Dewi, istri Edhy Prabowo, dan enam orang lainnya yakni Safri (SAF), Zaini (ZN), Yudha (YD), Yeni (YN), Desri (DES) dan Selamat (SMT) di Bandara Soekarno-Hatta.

Melansir laman Jakpus News, KPK menemukan ATM BNI atas nama AF, tas LV, tas Hermes, Baju Old Navy, jam Rolex, jam Jacob n Co, tas koper Tumi, dan tas koper LV.

Selain adanya penangkapan di bandara, pihak KPK juga mengamankan sembilan orang lainnya di tempat berbeda, untuk selanjutnya digiring ke Gedung Merah Putih KPK.

Kasus Edhy memang cukup menyita perhatian publik, apalagi pada awal menjabat politikus dari partai Gerindra itu berkomitmen untuk bekerja dengan jujur.

Namun nyatanya Edhy justru ketahuan merugikan negara, dan diperkirakan mendapat keuntungan hingga Rp9,8 miliar.

Beberapa pihak pun mendesak KPK menjatuhkan hukuman mati untuk Edhy, lantaran korupsi yang telah ia lakukan terjadi di tengah pandemi Covid-19.

Seruan untuk hukuman mati itu dilontarkan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej kepada wartawan.

Edhy pun mengaku siap jika pada akhirnya harus menerima hukuman mati, atau hukuman berat lainnya.

“Sekali lagi kalau memang saya dianggap salah saya tidak lari dari kesalahan, saya tetap tanggung jawab. Jangankan dihukum mati, lebih dari itu pun saya siap yang penting demi masyarakat saya,” kata Edhy Prabowo pada Senin, 22 Februari 2021.

Kendati demikian Edhy mengatakan telah melakukan tugasnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan sangat baik.

Apa yang ia tempuh semata-mata untuk memajukan KKP dan melaksanakan tanggung jawab dengan benar.

"Saya tidak bicara lebih baik atau tidak. Saya ingin menyempurnakan, intinya adalah setiap kebijakan yang saya ambil untuk kepentingan masyarakat. Kalau atas dasar masyarakat itu harus menanggung akibat akhirnya saya di penjara itu sudah risiko bagi saya," ujar Edhy.

Terkait pernyataan Edhy yang siap dihukum mati, pihak KPK akhirnya memberikan tanggapan.

Melansir laman Antara, pihak KPK enggan memutuskan hubungan yang patut diterima oleh Edhy.

“Namun, terkait hukuman tentu Majelis Hakim lah yang akan memutuskan,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Ali enggan berkomentar banyak lantaran pihaknya masih melakukan penyidikan terhadap Edhy dan kawan-kawannya.

Ia menegaskan lembaga antirasuah itu telah memiliki berbagai bukti yang sangat kuat atas dugaan korupsi yang dilakukan Edhy CS itu.

*“Setelah berkas lengkap tentu JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK akan segera melimpahkan perkara untuk diadili. Fakta hasil penyidikan akan dituangkan dalam surat dakwaan yang dibuktikan oleh JPU KPK,” katanya.****

Adapun berita kedua yang diteliti merupakan berita yang ditulis oleh Ferry Sandi dari media online CNBC Indonesia dengan judul “Ssst! Gurihnya Uang Triliunan Bisnis Benih Lobster” yang berisi terkait kerugian yang dialami negara akibat dari adanya korupsi benur yang dilakukan oleh Edhy Prabowo.

Yaitu pada narasi berita yang dipaparkan oleh CNBC Indonesia ini menyebutkan bahwa bisnis benih lobster merupakan sebuah bisnis yang memiliki keuntungan yang sangat besar. Setelah adanya OTT Edhy Prabowo di Bandara Soekarno Hatta pada 25 November 2020 lalu, bisnis ini semakin menjadi sorotan di masyarakat. Sebelumnya, ekspor benih lobster telah mendapatkan pelarangan

dari Menteri KKP sebelumnya yaitu Susi Pudjiastuti dan lebih menekankan kepada ekspor lobsternya saja. Namun setelah Edhy Prabowo menjabat, peraturan larangan ekspor benih lobster dicabut dan diperbolehkan kembali. Melalui kebijakan yang berubah-ubah ini, terjadi pula nilai ekspor benih lobster yang berubah-ubah dan merangkak naik. Bahkan setelah dicabutnya pelarangan ekspor benih lobster, nilai ekspor benih lobster semakin menjulang tinggi. Menurut laporan dari PPATK, aliran dana dari penyelundupan ekspor bisnis lobster sendiri mencapai Rp300 Miliar– Rp900 Miliar pertahun.

Adapun isi dari berita tersebut adalah sebagai berikut:

Ssst! Gurihnya Uang Triliunan Bisnis Benih Lobster

Jakarta, CNBC Indonesia - Bisnis ekspor benih lobster jadi sorotan terkait dugaan kasus korupsi dalam perizinan ekspor benih lobster. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditangkap KPK Rabu dini hari (25/11).

Bisnis lobster, benih maupun lobster dewasa memang terkait uang ratusan miliar bahkan triliunan. Sejak berlakunya larangan ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016, tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia, kinerja ekspor lobster terus naik dari tahun ke tahun.

Pada 2017 ekspor lobster jenis *Panulirus spp.* (HS 03063120) mencapai US\$ 16 juta. Kemudian di 2018, ekspor lobster naik jadi US\$ 26,15 juta. Kondisi yang sama juga terjadi saat larangan ekspor benih lobster dicabut.

Kini, justru ekspor benih lobster kode HS 03063110 justru yang terkerek naik semenjak dibebaskan mulai Mei 2020 lalu. Data BPS menunjukkan pada awal-awal pembukaan ekspor benih lobster pada Juni 2020, nilai ekspor masih relatif kecil yaitu US\$ 112.990.

Lalu pada Juli 2020 melonjak menjadi US\$ 3,67 juta pada Juli 2020, kemudian pada Agustus 'terbang' menjadi US\$ 6,43 juta sekitar Rp 90 miliar. Pada September bahkan menembus US\$ 15,16 juta, bila dengan kurs dolar Rp 14.200 maka setara dengan lebih dari Rp 200 miliar.

Bila diasumsikan rata-rata ekspor benih lobster sebanyak itu dalam sebulan, maka dalam setahun bisa mencapai Rp 2 triliun lebih. Angka ini cukup besar, karena sebelum adanya pencabutan larangan ekspor benih lobster, perkiraan penyelundupan benih lobster hampir Rp 1 triliun.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pernah mengungkapkan aliran dana penyelundupan benih lobster ke luar negeri mencapai Rp 300 miliar-Rp 900 miliar per tahun. Dana tersebut digunakan mendanai pengepul dalam negeri dan membeli benih tangkapan nelayan lokal.

4.1.2 Hasil Penelitian Terhadap Seleksi Isu Dan Penonjolan Aspek Realitas

Pada Pemberitaan Tentang Kasus Korupsi Mantan Menteri KKP Edhy

Prabowo di Pikiran Rakyat dan CNBC Indonesia

4.1.2.1 Seleksi Isu

A. Define Problem (Pendefinisian Masalah)

Pikiran Rakyat	CNBC Indonesia
Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo dinyatakan bersalah setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi benih lobster. Hukuman yang akan diterima oleh Edhy Prabowo menjadi sorotan publik atas tindak korupsi yang telah ia lakukan. (Alinea 1)	Kinerja ekspor benih lobster yang meningkat dari tahun ke tahun sehingga mempengaruhi nilai ekspor benih lobster. Hal ini juga berpengaruh terhadap berapa besar kerugian yang diakibatkan oleh Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo yang melakukan tindak pidana korupsi.(Alinea 2)

1) Pikiran Rakyat

Define problem dari media online Pikiran Rakyat yang berjudul “Edhy Prabowo Siap Dihukum Mati karena Korupsi Benur, KPK Bocorkan Langkah yang Telah Ditempuh” adalah menjelaskan terkait bagaimana tindak lanjut dari kasus korupsi yang dilakukan oleh Edhy Prabowo. Dalam berita yang ditulis oleh wartawan Nopsi Marga Handayani ini memiliki titik fokus terhadap hukuman apa yang akan diterima oleh sang koruptor. Proses hukum ini dinilai menjadi sorotan

publik karena tindak pidana korupsi merupakan suatu hal yang merugikan negara terutama masyarakat terutama korupsi ini dilakukan pada masa pandemi Covid-19.

Alasan memilih isu adalah kasus korupsi yang dilakukan Eks Menteri KKP Edhy Prabowo menjadi kasus korupsi yang cukup berat. Masyarakat wajib tahu perkembangan kasus Edhy, apalagi yang awalnya ia sempat sesumbar tak akan merugikan KKP. (Wawancara, Handayani 2021).

Dalam naskah berita dalam pemberitaan pada media *online* Pikiran Rakyat ini juga menerangkan terkait kasus Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo yang mengundang atensi publik. Dimana sang pejabat ini berkomitmen untuk bekerja secara jujur untuk menyejahterakan rakyat, namun yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Maka dari itu, pernyataan yang bertentangan ini membuat masyarakat tertarik untuk mengikuti kasus ini sampai akhir.

Selanjutnya, informan yang bernama Nopsi Marga Handayani, setelah dilakukan wawancara melalui media sosial *Instagram* pada tanggal 13 Agustus 2021, informan berpendapat bahwa kasus korupsi Edhy Prabowo menjadi kasus korupsi yang cukup berat. Masyarakat memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi terkait proses hukum yang akan dijalani oleh Edhy Prabowo. Menurutnya, wajib bagi seorang wartawan untuk memberikan informasi dari berbagai sudut pandang terlebih dari sudut proses hukum yang akan dijalani oleh seorang terpidana.

Pada saat itu KPK enggan mengomentari hukuman yang akan diterima Edhy atas kasus tersebut. Padahal masyarakat memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi. Sebagai karyawan media, saya merasa wajib memberitakan perkembangan kasus tersebut dari berbagai sudut pandang (Wawancara, Handayani 2021).

Dari pernyataan informan ini, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan dari berbagai sudut pandang sangat perlu untuk diberitakan kepada masyarakat, agar

masyarakat bisa mengontrol secara langsung bagaimana kelanjutan dari proses hukum tindak pidana korupsi Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo.

2) CNBC Indonesia

Define problem dari pemberitaan yang berjudul “Ssst! Gurihnya Uang Triliunan Bisnis Benih Lobster” dan dipublikasikan pada tanggal 25 November 2020 ini adalah terkait keuntungan yang menggiurkan dalam bisnis benih lobster yang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo.

Berdasarkan pernyataan dari informan yang bernama Ferry Sandi yang diwawancarai melalui media sosial *Instagram* pada 15 Agustus 2021, menurutnya besaran kerugian dari penyelendupan yang dilakukan oleh Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo sangat menjadi perhatian masyarakat. Bagaimana sebuah bisnis yang memiliki kebijakan yang berubah-ubah, yang harusnya memiliki nilai tinggi dan menambah devisa negara malah menjadi merugikan negara dan hanya menguntungkan pihak tertentu.

Besarnya potensi penyelewengan dari kebijakan ini perlu menjadi perhatian atau atensi publik. Jika tidak, kebijakan yang akan muncul di Menteri selanjutnya (saat itu) malah semakin ngawur, meski ujungnya ada pelarangan. (Wawancara Sandi, 2021)

Menurut informan yang bernama Ferry Sandi dari media *online* CNBC Indonesia yang diwawancarai pada tanggal 15 Agustus 2021 melalui media sosial *Instagram* bahwa isu yang disajikan adalah berupa besar potensi uang yang dihasilkan dari bisnis benih lobster. Bisnis lobster menjadi sorotan masyarakat setelah Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo diduga terlibat kasus korupsi ekspor benih lobster. Ekspor benih lobster dinilai memiliki kebijakan yang berubah-ubah

setiap tahun yang membuat nilai dari komoditas ini berubah-ubah meskipun nilainya sama-sama tinggi (Wawancara Sandi, 2021).

Soal besarnya potensi uang yang dihasilkan dari ekspor benih lobster ini, bagaimana perubahan kebijakan dari tahun ke tahun membuat nilai ekspor dari komoditas ini selalu berubah, meski nilainya sama-sama besar (Wawancara, Sandi 2021).

Potensi bisnis lobster ini dinilai menggiurkan dan rawan terhadap tindak pidana korupsi. Berdasarkan naskah berita yang terdapat dalam media *online* CNBC Indonesia, peneliti berasumsi bahwa perubahan kebijakan sangat berpengaruh terhadap potensi bisnis benih lobster yang sebelumnya dilarang. Dalam pemberitaan ini, penulis berita tersebut yaitu Ferry Sandi mengambil data dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang memiliki data akurat dan akuntabel terkait bisnis benih lobster atau yang disebut dengan benur ini.

Mengacu pada minat masyarakat dalam membaca berita, besar potensi yang dihasilkan oleh ekspor benih lobster ini menjadi sorotan dari masyarakat. Masyarakat yang pada awalnya tidak mengetahui apa itu ekspor benih lobster, menjadi tertarik perhatiannya karena tindak pidana korupsi yang merugikan negara ini.

Dari kedua berita yang diteliti ini, peneliti menyimpulkan bahwa *define problem* dari media *online* Pikiran Rakyat adalah pernyataan bersalah Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus korupsi ekspor benih lobster. Untuk *define problem* dari media *online* CNBC Indonesia sendiri lebih kepada kebijakan ekspor benih lobster yang berubah-ubah sehingga mempengaruhi nilai ekspor benih lobster yang semakin merangkak naik.

B. Diagnoses Causes (Memperkirakan Sumber Masalah)

Pikiran Rakyat	CNBC Indonesia
Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak korupsi ekspor benih lobster pada saat pulang dari Amerika di Bandara Soekarno-Hatta. (Alinea 2)	Benih lobster menjadi sorotan publik setelah mantan Menteri KKP Edhy Prabowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. (Alinea 1)

1) Pikiran Rakyat

Pada berita yang berjudul “Edhy Prabowo Siap Dihukum Mati karena Korupsi Benur, KPK Bocorkan Langkah yang Telah Ditempuh” oleh media *online* Pikiran Rakyat, berdasarkan pernyataan informan yang diwawancarai melalui media sosial *Instagram* pada 13 Agustus 2021 menyebutkan bahwa masalah dalam isi berita tersebut disebabkan oleh terjaringnya OTT Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo setelah pulang dari luar negeri. Penangkapan ini terus berkembang menjadi sebuah kasus yang menyita perhatian masyarakat. Dalam media Pikiran Rakyat ini, disebutkan kronologi penangkapan serta siapa saja yang terlibat dalam kasus suap benih lobster tersebut.

Menurut informan yang bernama Nopsi Marga Handayani, ketika diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 13 Agustus 2021 melalui media sosial *Instagram* mengatakan bahwa sumber masalah dari berita yang ia tulis adalah tertangkapnya Menteri KKP Edhy Prabowo sebagai terduga korupsi ekspor benih lobster. Yang dimana, sebelumnya Edhy Prabowo telah sesumbar bahwa dirinya tidak akan merugikan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, dirinya malah

melakukan tindak pidana korupsi dan terlebih hal tersebut dilakukan pada masa pandemi Covid-19.

Menurut saya, hal yang paling penting untuk dibahas adalah hukuman apa yang akan dijatuhkan untuk edhy prabowo, yang telah melakukan korupsi selama pandemi, (Wawancara, Handayani 2021).

Dari pernyataan informan ini, peneliti menganalisis bahwa pernyataan Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo yang sesumbar akan bekerja dengan jujur untuk Kementerian KKP malah berperilaku sebaliknya dengan terlibat dalam korupsi ekspor benih lobster. Apalagi tindak pidana korupsi ini terungkap di masa pandemi Covid-19, dimana perekonomian di Indonesia semakin terpuruk akibat tindak pidana korupsi oleh pejabat pemerintahannya.

Kronologi dari permasalahan yang diberitakan perlu ditulis oleh seorang wartawan ataupun jurnalis. Hal ini bisa membantu para pembaca untuk mengingat kembali terkait pemberitaan yang akan dibacanya. Serta membuat pembaca lebih mudah untuk mengikuti perkembangan kasus tersebut.

2) CNBC Indonesia

Berdasarkan berita yang berjudul “Ssst! Gurihnya Uang Triliunan Bisnis Benih Lobster” yang dipublikasikan oleh media *online* CNBC Indonesia, peneliti menganalisis bahwa sumber masalah dari pemberitaan tersebut didasari oleh terungkapnya kasus terjaringnya OTT Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi benih lobster. Dalam hal ini, peneliti juga menganalisis tertangkapnya Edhy Prabowo akibat korupsi benih lobster menyebabkan masyarakat terfokus kepada objek yang dikorupsi yaitu benih lobster.

Masyarakat atau pembaca berita perlu mengetahui berapa kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi ini.

Menurut Ferry Sandi yang merupakan informan dari media CNBC Indonesia saat diwawancarai melalui media sosial *Instagram* pada 21 Oktober 2021 menyebutkan kebijakan ekspor benih lobster yang berubah-ubah turut menjadi sumber dari permasalahan tindak korupsi ini. Seperti yang disebutkan di dalam naskah berita, terdapat perubahan kebijakan yang menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi. Peneliti menganalisis bahwa dengan disebutkannya beberapa kebijakan di pemberitaan ini membuat pembaca ikut memperhatikan bagaimana perubahan kebijakan tersebut memiliki dampak terhadap harga bisnis ekspor benih lobster yang saat ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Setelah tertangkapnya Menteri tersebut, kebijakan pembukaan ekspor benih lobster kembali disorot. Namun, beberapa kemudian kebijakan itu kembali dilarang, yang menandakan memang ada masalah ketika dibuka. Jadi sumber masalah mengarah pada kebijakan pembukaan ekspor benur, (Wawancara, Sandi 2021).

Menurutnya, benih lobster menjadi sorotan publik dan masyarakat harus memperhatikan kebijakan-kebijakan terkait ekspor benih lobster agar tidak terjadi penyelewengan. Terjaringnya OTT Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo menggiring masyarakat untuk memperhatikan perubahan kebijakan dari tahun ke tahun yang menyebabkan penyelewengan yang nilainya tidak kecil.

Dari kedua berita yang diteliti, Pikiran Rakyat memiliki *diagnose causes* berupa OTT dari Edhy Prabowo sendiri setelah sepulang dari Amerika ketika berada di Bandara Soekarno Hatta. Kemudian untuk CNBC Indonesia, memiliki

diagnose causes adalah bisnis benih lobster menjadi sorotan publik setelah Edhy Prabowo terungkap terlibat dalam tindak pidana korupsi.

C. Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)

Pikiran Rakyat	CNBC Indonesia
Beberapa pihak, salah satunya yaitu Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mendesak KPK untuk menjatuhkan hukuman mati untuk Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo. Bahkan, Mantan Menteri KKP mengaku siap jika harus menjalani hukuman mati ataupun hukuman berat lainnya. (Alinea 9)	Diperkirakan jumlah total dana akibat penyelundupan benih lobster mencapai 2 triliun rupiah. Dimana angka ini cukup besar dikarenakan sebelum adanya pencabutan larangan ekspor benih, total dana penyelundupan benih lobster sudah mencapai 1 triliun rupiah. (Alinea 6)

1) Pikiran Rakyat

Dalam pemberitaan kasus tindak korupsi benih lobster yang dipublikasikan oleh media *online* Pikiran Rakyat ini, peneliti menganalisis bahwa berdasarkan teks berita tersebut menyebutkan desakan dari beberapa pihak yang terlibat dalam proses hukum tindak pidana korupsi Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo. Seperti terdapat seruan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej kepada insan pers, yang mana ia mendesak KPK untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Edhy Prabowo. Menurut peneliti, pada bagian ini penulis berita mengambil keputusan moral yaitu memberitahukan kepada khalayak serta mendesak aparat pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada tersangka tindak pidana korupsi.

Menurut peneliti, beberapa pernyataan yang dijelaskan dalam berita yang dipublikasikan oleh media *online* Pikiran Rakyat merujuk kepada hukuman yang

akan diberikan terhadap terpidana korupsi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, beberapa seruan hukuman mati untuk Edhy Prabowo menunjukkan betapa ruginya pemerintah ketika terdapat salah satu pejabatnya yang korupsi, sehingga membuat beberapa pihak mengeluarkan pendapatnya untuk menyebutkan hukuman apa yang pantas untuk sang terpidana korupsi. Pemberitaan ini begitu menyita perhatian masyarakat, terlebih seorang menteri adalah pejabat yang seharusnya memberikan pelayanan yang baik untuk rakyatnya, bukan malah sebaliknya.

Menurut informan yang bernama Nopsi Marga Handayani yang merupakan seorang penulis berita yang diteliti sekaligus jurnalis dari media *online* Pikiran Rakyat saat diwawancarai peneliti pada tanggal 22 Oktober 2021, berpendapat bahwa dalam berita yang ia tulis, ia mengambil isu terkait hukuman apa yang pantas diberikan kepada Edhy Prabowo. Media mengkawal terus setiap pemberitaan terkait kasus korupsi Edhy Prabowo. Meskipun pada berita yang ia tulis KPK enggan untuk memberikan pernyataan terkait hukuman apa yang akan diberikan kepada Edhy Prabowo, namun terdapat desakan-desakan yang mendorong KPK untuk memberikan Edhy Prabowo hukuman yang setimpal akibat perbuatannya (Wawancara Handayani, 2021).

Masyarakat perlu mendapat pemaparan yang jelas terkait perkembangan proses hukum yang tengah dijalani Edhy, sebagai pejabat negara, sekaligus sosok yang harusnya membantu rakyat (Wawancara, Handayani 2021).

Dari pernyataan informan ini, peneliti menganalisis bahwa sebuah pemberitaan bisa mendorong masyarakat untuk memberikan opini dan memperhatikan perkembangan kasus yang telah merugikan negara ini. Adanya perhatian dari masyarakat terkait kebijakan khususnya hukum di Indonesia. Apalagi

hal ini menyangkut kepemimpinan kedepannya, maka dengan hal ini media wajib memberikan informasi terkait perkembangan kasus yang terjadi di pemerintahan.

2) CNBC Indonesia

Make moral judgement dari pemberitaan tindak pidana korupsi yang dipublikasikan oleh media *online* CNBC Indonesia pada tanggal 25 November 2020 adalah, pada pemberitaan tersebut disebutkan kisaran berapa total dari penyelundupan dana yang dilakukan oleh Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo. Kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut adalah mencapai 2 triliun rupiah. Hal ini tentunya menjadi sebuah nilai moral dimana negara mengalami kerugian yang begitu banyak akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mantan Menteri KKP ini. Kebijakan yang terus berubah membuat negara mengalami kerugian yang cukup tinggi.

Dengan adanya pemberitaan melalui media *online* CNBC Indonesia, peneliti berpendapat bahwa penerapan kebijakan apalagi yang menyangkut ekspor dan perekonomian harus diterapkan secara hati-hati karena rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Penyajian informasi dengan menyertakan peraturan pelarangan ekspor benih lobster membuat masyarakat lebih memerhatikan kenapa tiba-tiba ada perubahan kebijakan sehingga mengundang kecurigaan dari berbagai pihak.

Menurut informan, yaitu Ferry Sandi saat diwawancarai melalui media sosial *Instagram* pada tanggal 20 Oktober 2021. Informan menyebutkan bahwa nilai moral yang ia sampaikan dalam berita yang ia tulis adalah tertangkapnya Edhy Prabowo dalam kasus pidana korupsi benih lobster adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mementingkan kepentingan orang banyak dan

jangan hanya suatu pihak ataupun pribadi. Seperti yang terdapat dalam berita yang ia tulis, kerugian yang dialami oleh negara tidaklah kecil. Maka dari itu kebijakan yang diambil harus memperhatikan dari berbagai aspek, apalagi ini tidak hanya menyangkut kerugian negara akan tetapi juga ekosistem lingkungan (Wawancara Sandi, 2021).

Dari kedua berita yang diteliti ini, peneliti menyimpulkan bahwa *make moral judgement* dari media Pikiran Rakyat meliputi proses hukum yang dialami Edhy Prabowo secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan kasus Edhy Prabowo. Sementara, untuk *make moral judgement* dari CNBC Indonesia menjelaskan bahwa pejabat pemerintah harus berhati-hati dalam membuat kebijakan agar tidak terjadi penyelewengan kembali.

D. *Treatmen Recommendation* (Penekanan Penyelesaian)

Pikiran Rakyat	CNBC Indonesia
Juru Bicara KPK, Ali Fikri enggan menyebutkan hukuman apa yang akan dilimpahkan kepada Edhy Prabowo. Ia menuturkan bahwa pihaknya masih melakukan penyidikan terhadap Edhy dan juga pihak lain yang terlibat. (Alinea terakhir)	PPATK menjelaskan bahwa setiap tahunnya aliran dana dalam hal penyelundupan benih lobster mencapai 300-900 miliar. Dana ini digunakan untuk pengepul dalam negeri dan membeli benih hasil tangkapan nelayan lokal. (Alinea Terakhir)

1) Pikiran Rakyat

Dalam pemberitaan yang dipublikasikan media Pikiran Rakyat menampilkan sebuah pernyataan dari KPK yang masih enggan menyebutkan hukuman apa yang akan diberikan kepada Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo

atas tindak pidana korupsinya ini. Hal ini dikarenakan masa persidangan masih berlangsung dan Mahkamah Agung serta KPK belum memberikan keputusan terkait hukuman apa yang diberikan kepada sang terpidana. Namun selain itu, dalam berita tersebut disebutkan bahwa Edhy Prabowo siap dihukum mati apabila itu demi kepentingan masyarakat.

Hukuman yang masih belum diputuskan ini membuat masyarakat bisa beropini bebas terkait apa hukuman yang akan diberikan kepada Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo. Dengan memberikan beberapa pernyataan dari seorang tokoh terkait hukuman mati, peneliti menganalisis hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi KPK maupun Mahkamah Agung dalam memberikan dakwaan nantinya. Karena pemberitaan ini dibaca oleh khalayak umum, maka hal ini juga bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk terus mengetahui perkembangan kasus tersebut.

Nopsi Marga Handayani yang merupakan informan serta wartawan dari media *online* Pikiran Rakyat saat diwawancarai melalui media sosial *Instagram* menerangkan sesuai dalam isi berita tersebut. Berita ini menggambarkan proses hukum yang akan dijalani oleh terpidana korupsi Edhy Prabowo akibat korupsi ekspor benih lobster. Penyelesaian yang ditawarkan dalam pemberitaan tersebut adalah bagaimana masyarakat serta pihak lain mendorong KPK untuk memberikan hukuman yang tepat untuk Edhy Prabowo (Wawancara, Handayani 2021).

2) CNBC Indonesia

Dalam pemberitaan ini, diakhiri dengan sebuah penjelasan mengenai aliran dana dalam penyelundupan benih lobster ke luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengepul dalam negeri dan membeli benih tangkapan nelayan lokal.

Menurut peneliti, pada bagian ini penulis berita ingin menunjukkan akibat dari perubahan kebijakan serta penyelundupan benih lobster yang menuai banyak kerugian. Di dalam berita tersebut, disebutkan beberapa kali terjadi kenaikan harga ekspor benih lobster yang didapat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dengan disebutkannya kisaran total dari dana yang dikorupsi oleh Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo, peneliti menganalisis hal ini dapat menjadi perhatian bagi masyarakat terkait kerugian yang diakibatkan oleh Edhy Prabowo. Selain itu, ini bisa menjadi sebuah *angle* pemberitaan baru bagi jurnalis yang ingin lebih mengulik sampai tuntas terkait bisnis lobster yang digunakan sebagai media untuk melakukan tindak pidana korupsi Edhy Prabowo.

Dipublikasikannya besaran dana, kebijakan, serta perubahan kenaikan harga ekspor benih lobster dapat membuat pemerintah pusat atau pejabat pembuat kebijakan dapat berhati-hati dalam membuat sebuah peraturan agar tidak muncul celah adanya tindak pidana korupsi kedepannya.

Ferry Sandi yang merupakan informan sekaligus penulis berita yang diteliti saat diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 21 Oktober 2020 menyebutkan, penyelesaian yang ditekankan dalam berita tersebut adalah untuk mendorong aparat penegak hukum agar lebih sadar bahwa nilai bisnis di ekspor benih lobster sangat besar, yakni melalui akurat data dari sumber kredibel (Wawancara, Sandi 2021).

Mendorong aparat penegak hukum agar lebih sadar bahwa nilai bisnis di ekspor benih lobster sangat besar, yakni melalui akurat data dari sumber kredibel. Terkait penyelesaian itu kembali pada aparat dalam menyelesaikan kasusnya, (Wawancara Sandi, 2021).

Menurut peneliti, besaran dana yang dikorupsi bisa menimbulkan kerugian yang besar bagi negara. Pemberitaan terkait objek dari yang dikorupsi oleh Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo ini bisa menjadi transparansi bagi masyarakat untuk selalu mengikuti perkembangan yang selanjutnya akan diputuskan.

Dari kedua berita ini, *treatment recommendation* dari pemberitaan di Media Pikiran Rakyat adalah pemberitaan yang masih berlanjut ini diakhiri melalui pernyataan KPK yang masih belum memutuskan hukuman apa yang akan diberikan kepada Edhy Prabowo. Sementara untuk di media CNBC Indonesia, peneliti menyimpulkan bahwa pemberitaan ini diakhiri oleh sumber data dari PPATK yang menyebutkan bahwa penyelundupan dalam ekspor benih lobster ini sebesar Rp.300-Rp.900 Miliar pertahun, sehingga perlu adanya kebijakan tegas mengenai permasalahan ini.

4.1.2.2 Penonjolan Aspek Realitas

1) Pikiran Rakyat

Dalam berita yang diteliti dalam media *online* Pikiran Rakyat yang berjudul “Edhy Prabowo Siap Dihukum Mati karena Korupsi Benur, KPK Bocorkan Langkah yang Telah Ditempuh” menurut peneliti berita ini berisi beberapa aspek yang ditonjolkan seperti penggunaan gambar yaitu Edhy Prabowo yang menggunakan rompi bagi terpidana korupsi menjadi *headline* dari berita tersebut. Gambar tersebut menggambarkan langsung identitas siapa yang melakukan korupsi, dan apa tindak pidana yang ia lakukan. Selain itu, menurut peneliti, pada berita tersebut ditonjolkan kronologi penangkapan sampai dengan desakan-desakan dari pihak lain yang menuntut Edhy Prabowo harus dihukum mati akibat dari

perbuatannya itu. Maka dari itu, peneliti berpendapat bahwa Pikiran Rakyat lebih mengedepankan kronologi beserta proses hukum untuk ditonjolkan dalam berita tersebut.

Menurut informan yang bernama Nopsi Marga Handayani saat diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 22 Oktober 2021 menerangkan bahwa pemilihan gambar serta judul dari berita tersebut sudah mewakili keseluruhan dari berita tersebut. Dalam hal ini juga terdapat pihak-pihak mana saja yang terlibat dan akan menjadi saksi dalam persidangan nanti. Hal ini akan berpengaruh terhadap hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo. Maka dari itu, aspek yang ditonjolkan dalam berita ini adalah tentang alur proses hukum yang akan diterima oleh Edhy Prabowo (Wawancara, Handayani 2021).

Tak hanya gambar, pemilihan judul pun dirasa sangat tepat dan sudah menggambarkan isi topik dan sudut pandang dari pemberitaan itu sendiri. Memiliki kata “Hukuman Mati” peneliti menganalisis hal ini menjadi daya tarik dari pemberitaan itu sendiri, hukuman mati dirasa sebagai hukuman yang ekstrim untuk diberlakukan kepada seorang terpidana. Maka dengan hal tersebut, menambahkan kesan unik tersendiri yang dapat mengundang animo masyarakat yang sangat tinggi.

Memilih judul seperti itu karena sudah memenuhi standar dalam penulisan berita, termasuk sudah menunjukkan apa yang akan dibicarakan artikel (Wawancara, Handayani 2021).

Proses hukum yang diberitakan ini akan menjadi sebuah series yang dinantikan oleh masyarakat kedepannya sampai palu pengadilan diketuk. Masyarakat atau khalayak juga perlu mengetahui transparansi proses hukum agar tidak terjadi lagi penyelewengan dalam proses hukumnya.

Dalam naskah pemberitaan ini, penulis berita tersebut menggunakan sebutan “Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo” tidak disebutkan masih menjabat sebagai Menteri KKP Edhy Prabowo karena pada masa persidangan Edhy Prabowo sudah dicabut statusnya sebagai Menteri KKP Edhy Prabowo dan telah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung.

Aspek realitas sosial yang terdapat dalam pemberitaan ini adalah, bagaimana dampak dari adanya pemberitaan ini kepada masyarakat sehingga masyarakat banyak membanding-bandingkan hukuman yang akan Edhy Prabowo terima dengan tindak pidana lain. Ketika masyarakat menyaksikan berita terkait hukuman Edhy Prabowo, masyarakat memberikan beragam opini sampai mendesak KPK untuk memberikan hukuman mati. Seperti apa yang diucapkan oleh Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej kepada wartawan, dimana dirinya melontarkan ungkapan hukuman mati untuk Edhy Prabowo.

2) CNBC Indonesia

Dalam pemberitaan yang berjudul “Ssst! Gurihnya Uang Triliunan Bisnis Benih Lobster” yang dipublikasikan pada tanggal 25 November 2021, menurut peneliti yang ditonjolkan dalam berita tersebut adalah beberapa perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang membuat naiknya harga bisnis ekspor benih lobster seperti yang terdapat dalam berita disebutkan pada awalnya ada Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 mengenai pelarangan ekspor benih lobster, namun setelah larangan itu dicabut terjadi beberapa kali kenaikan dari komoditas benih lobster. Pada gambar yang digunakan dalam berita ini juga

menggambarkan bagaimana bentuk dari benih lobster yang menjadi objek tindak pidana korupsi Edhy Prabowo.

Dalam berita tersebut terdapat penggunaan judul yang menarik dan berbeda dari judul berita lainnya. Peneliti menganalisis hal ini bisa menjadi daya tarik sendiri bagi para pembaca untuk membaca berita tersebut. Judul yang menggunakan kata-kata “Ssst” mengisyaratkan secara tidak langsung bahwa hal tersebut bersifat rahasia yang kini harus diketahui oleh khalayak.

Sementara, Ferry Sandi yaitu informan yang merupakan jurnalis pembuat berita yang diteliti saat diwawancarai melalui media sosial *Instagram* menyebutkan bahwa hal yang ditonjolkan dalam beritanya adalah latar belakang adanya tindak korupsi Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo, yaitu benih lobster yang memiliki nilai yang cukup menggiurkan. Dalam teks berita tersebut juga dituliskan beberapa data yang didapat oleh penulis berita atau jurnalis tersebut untuk lebih menguatkan apa yang tercantum dalam berita. Judul berita yang digunakan juga cukup untuk menarik perhatian serta menggambarkan isi dari berita yang ditulis (Wawancara, Sandi 2021).

Dalam pemberitaan ini, peneliti menganalisis bahwa penulis berita menyebut “Menteri KKP Edhy Prabowo” tidak dengan kata sebutan “Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo” dikarenakan pada saat melakukan tindak pidana korupsi, Edhy Prabowo masih menjabat sebagai Menteri KKP. Maka dalam pembahasan bisnis lobster ini, masih menggunakan kata Menteri KKP.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan dalam penelitian Analisis *Framing* Pemberitaan Korupsi Edhy Prabowo di Media *Online* Pikiran Rakyat dan CNBC Indonesia dengan menggunakan model Robert N Entman dapat dijelaskan sesuai dengan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana seleksi isu yang menyangkut *define problem*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation* serta apa yang aspek-aspek realitas yang ditonjolkan dalam pemberitaan tersebut, dapat dilihat melalui pembahasan berikut ini.

4.2.1 Konstruksi Realitas Pemberitaan Korupsi Ekspor Benih Lobster

Menteri KKP Edhy Prabowo di Media *online* Pikiran Rakyat

Dalam penelitian terdahulu yang berjudul Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Sosok Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Di Media Online disebutkan bahwa seleksi isu meliputi 4 konsep yang dianalisis oleh peneliti yaitu *define problem*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*.

Define Problem atau pendefinisian masalah dari berita yang berjudul “Edhy Prabowo Siap Dihukum Mati karena Korupsi Benur, KPK Bocorkan Langkah yang Telah Ditempuh adalah menyoroti bagaimana proses hukum yang akan ditegakkan dalam menangani tindak pidana korupsi ekspor benih lobster dari Edhy Prabowo. Seperti ada beberapa pernyataan atau beberapa kutipan dari wawancara Edhy Prabowo yang mengaku siap dihukum mati serta Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej yang mendesak KPK untuk memberikan hukuman mati kepada Edhy

Prabowo. Define *Problem* atau pendefinisian masalah sendiri merupakan bagaimana seorang wartawan melihat isu atau pemberitaan tersebut.

Hal utama yang dijelaskan dalam berita dari media *online* Pikiran Rakyat ini, peneliti menganalisis bahwa hal yang paling disoroti dalam berita ini adalah tanggapan dari Menteri KKP Edhy Prabowo yang mengaku siap jika akan dihukum mati karena telah merugikan negara. Perilaku yang merugikan negara ini membuat Edhy Prabowo harus mendapat kecaman dari beberapa pihak yang mendesak KPK untuk memberikan hukuman yang setimpal berupa hukuman mati untuk Edhy Prabowo.

Maka dari itu, sesuai dengan analisis peneliti maupun pernyataan dari beberapa informan, maka pemberitaan tersebut menyoroti atau mengacu pada proses hukum yang dijalani oleh Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo yang melakukan korupsi ekspor benih lobster. Proses hukum merupakan suatu hal yang sangat krusial dalam suatu tindak pidana korupsi. Mengingat jabatan tinggi yang dimiliki oleh sang koruptur menjadikan isu ini menjadi isu yang ramai diperbincangkan serta diberitakan di berbagai macam *platform*. Dengan judul yang diambil oleh penulis berita tersebut, peneliti menganalisis bahwa pemberitaan ini mengambil sudut pandang dimana Edhy Prabowo mengaku siap dihukum mati karena perbuatannya. Maka pendefinisian yang tepat untuk menggambarkan apa yang disampaikan oleh jurnalis media Pikiran Rakyat ini adalah bagaimana pendapat Edhy Prabowo serta pihak lain terkait hukuman yang akan dijatuhkan kepada Edhy Prabowo sebagai pelaku tindak pidana korupsi ekspor benih lobster.

Hal seperti ini juga disampaikan oleh narasumber yang merupakan seorang wartawan media *online* Kompas.com, Tatang Guritno yang diwawancarai oleh peneliti melalui media sosial *Whatsapp* pada tanggal 4 September 2021, menurutnya *highlight* dari pemberitaan kasus korupsi adalah dimulai dari kejadian berita penangkapan yang dilanjutkan ke dalam proses peradilan. Pada pemberitaan ini, animo atau perhatian masyarakat dinilai lebih tinggi dikarenakan masyarakat akan menilai bagaimana proses hukum yang akan dijalani oleh terdakwa.

Kemudian yang kedua adalah *diagnose causes* yaitu sumber masalah dari pemberitaan tersebut. Penentuan sumber masalah ini merujuk analisis dari peneliti terhadap sumber dari masalah yang sedang diberitakan itu seperti apa.

Adapun sumber masalah dari pemberitaan tersebut adalah terjaringnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Edhy Prabowo setelah sepulang dari Amerika Serikat pada saat di Bandara Soekarno Hatta. Pada penangkapan ini, Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo diduga melakukan tindak pidana korupsi ekspor benih lobster. Masalah penangkapan ini berujung pada proses hukum yang dijalani oleh sang terdakwa, sehingga menimbulkan beberapa reaksi dari masyarakat terkhusus desakan pidana mati untuk Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo, seperti apa yang disebutkan oleh narasumber dari Kompas.com yaitu Tatang Guritno. Menurut hal yang harus dipublikasikan oleh seorang jurnalis dalam sebuah media adalah bagaimana kronologi tertangkapnya seorang terpidana korupsi, sehingga masyarakat bisa tau bagaimana awal dari kasus tersebut.

Kronologi ini perlu dijelaskan mengingat bagaimana awal dari terungkapnya kasus tindak pidana korupsi, agar masyarakat ikut memperhatikan

dari awal bagaimana perkembangan kasus tersebut. Dalam naskah berita tersebut, dijelaskan bagaimana kronologi awal atau sumber masalah penyebab dari kemunculan kasus tersebut, yaitu dengan terjaringnya OTT Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo.

Seperti yang dijelaskan pada paragraf kedua awal dari berita tersebut, yaitu yang menjelaskan terkait penangkapan Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo. Dalam pemingkakan pemberitaan ini, paragraf awal tidak langsung ke inti permasalahan yang membahas apa yang tertera di dalam judul melainkan menjelaskan terlebih dahulu sumber masalah dan kronologi awal dari berita tersebut.

Tatang Guritno yang merupakan narasumber dari penelitian ini, mengungkapkan saat diwawancarai peneliti melalui media sosial *Whatsapp* menyebutkan bahwa sumber masalah dari pemberitaan adalah bagaimana kronologi penangkapan dari tersangka korupsi yaitu Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo, kemudian kasus masih di KPK, lalu dilanjutkan ke tahapan persidangan untuk menentukan hukuman apa yang akan didatapkan oleh sang koruptor yang telah merugikan negara.

Peneliti menganalisis bahwa di setiap awal pemberitaan perkembangan suatu kasus tindak pidana korupsi atau tindak pidana kriminal lainnya perlu disebutkan bagaimana kronologi awal sebagai pengingat kepada pembaca terkait apa yang terjadi sebelumnya, sebelum perkembangan berita tersebut dimunculkan. Peneliti berpendapat bahwa jika seorang penulis berita langsung memberitakan sesuatu tanpa adanya *flashback* terhadap pemberitaan sebelumnya maka pembaca

akan bingung, apalagi jika pembaca tersebut tidak mengikuti perkembangan kasusnya dari awal.

Yang ketiga merupakan *make moral judgements* yaitu sebuah keputusan moral atau nilai moral apa yang ditunjukkan oleh sang penulis berita untuk menjelaskan sebuah masalah pada pemberitaan tersebut.

Nilai moral yang disajikan oleh wartawan media *online* pikiran rakyat pada hal ini adalah sebuah keadilan hukum yang ditonjolkan untuk menunjukkan kepada masyarakat sejauh mana proses hukum dan apa hukuman yang akan diberikan kepada Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo. Keadilan hukum disini dapat dilihat dari beberapa kutipan yang menyebutkan terkait hukuman mati yang ditujukan kepada Edhy Prabowo. Meskipun pada berita ini KPK masih enggan memberikan pernyataan dikarenakan kasus ini masih dalam penyelidikan, akan tetapi berita terkait hukuman bagi koruptor ini sangat diminati masyarakat.

Dengan adanya pemberitaan ini, bisa membangun opini masyarakat terkait kebijakan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Edhy Prabowo. Dalam hal ini, peneliti menganalisis bahwa secara tidak langsung masyarakat ikut andil dalam memberikan opini terkait hukuman kepada Edhy Prabowo meskipun keputusan utama adalah di Mahkamah Agung.

Wartawan Kompas.com yang merupakan narasumber serta jurnalis di pos tindak pidana korupsi sependapat dengan apa yang diungkapkan peneliti dan informan. Tatang Guritno yang diwawancarai pada tanggal 4 September 2021 melalui media sosial *Whatsapp* menyebutkan bahwa setiap pemberitaan terkait

persidangan atau proses hukum selalu menjadi *highlight* sendiri oleh para media. Proses hukum seperti dakwaan-dakwaan yang terdapat dalam proses persidangan membuat para awak media gencar untuk memberitakan terkait tindak korupsi ini. Narasumber penelitian ini juga mengatakan, bahwa nilai moral yang terdapat dalam setiap kasus korupsi adalah keadilan hukum. Apakah seseorang yang telah dipilih bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan karena hal ini menyangkut hajat banyak orang. Lalu, apakah Mahkamah Agung serta KPK dapat memberikan vonis yang sesuai dengan apa yang seharusnya ditetapkan, maka dari itu media terus memberikan informasi kepada masyarakat terkait proses hukum yang dijalani oleh sang terpidana.

Yang terakhir adalah *treatment recommendation* yaitu penekanan penyelesaian masalah atau rekomendasi yang ditunjukkan oleh seorang penulis berita kepada para pembacanya.

Dalam pemberitaan di media *online* Pikiran Rakyat, hal yang menjadi rekomendasi wartawan bisa dilihat dari beberapa paragraf menuju akhir yaitu pernyataan KPK yang masih belum jelas terkait hukuman apa yang diberikan. Hal ini bisa menjadi bahan perbincangan bagi masyarakat untuk menentukan atau memberika opininya terkait hukuman apakah yang akan diterima oleh Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo. Seperti menurut wartawan Kompas.com yaitu Tatang Guritno yang menyebutkan bahwa animo masyarakat terhadap hukuman kasus korupsi itu sangatlah tinggi apalagi korupsi ini merugikan negara dan merugikan masyarakat, sehingga biasanya setelah membaca berita dari sebuah media, khalayak

akan memberikan pendapat ataupun komentar terkait berita hukuman bagi terpidana korupsi.

Melalui teknologi yang semakin maju sekarang ini, memudahkan masyarakat untuk memberikan opininya terkait penyelenggaraan pemerintahan. Animo masyarakat bisa dilihat dari antusiasme masyarakat di berbagai platform media sosial dengan memberikan jejak pendapat terkait proses hukum yang dilakukan oleh Edhy Prabowo.

Peneliti menganalisis bahwa dengan berbedanya kasus tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya menunjukkan betapa seriusnya kasus korupsi dibandingkan kasus lainnya. Seperti pada halnya di beberapa media, pemberitaan korupsi menjadi sebuah rubrik tersendiri dengan menyajikan perkembangan dari kasus yang sedang berjalan.

Menurut narasumber yaitu Tatang Guritno dari Kompas.com saat diwawancarai melalui media sosial *Whatsaapp* pada tanggal 4 September 2021 menyebutkan bahwa hukuman yang diterima oleh sang terpidana korupsi menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh masyarakat. Seringkali masyarakat membandingkan hukuman tindak pidana korupsi dengan tindak pidana yang lainnya. Maka dari itu tindak pidana korupsi memiliki persidangan yang berbeda dengan tindak pidana lainnya.

Penonjolan aspek realitas dalam sebuah pemberitaan merujuk kepada bagaimana sebuah berita itu dapat diingat dan menarik perhatian masyarakat (Mustika, 2017).

Adapun penonjolan aspek realitas yang dapat dilihat dari pemberitaan yang berjudul “Edhy Prabowo Siap Dihukum Mati karena Korupsi Benar, KPK Bocorkan Langkah yang Telah Ditempuh” adalah jika dianalisis melalui judul, maka bisa dilihat bahwa pemberitaan ini memiliki sudut pandang yaitu terkait proses hukum yang akan dijalani oleh Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo. Judul yang diambil menggambarkan keseluruhan isi berita dan memiliki daya tarik yaitu “hukuman mati” yang dimana hal ini menjadi perhatian publik.

Tak hanya itu, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang menteri dapat menyita perhatian ruang publik. Peneliti menganalisis bahwa menteri merupakan jabatan yang tinggi di pemerintahan karena menteri dipilih langsung oleh presiden untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan kabinet yang ada. Jika seorang menteri tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, maka hal ini dapat memperburuk citra pemerintah di mata rakyat. Maka hal yang ditonjolkan dalam pemberitaan ini adalah bagaimana hukuman yang pantas untuk seorang menteri yang merupakan pejabat melakukan tindak pidana korupsi.

Seperti yang diungkapkan oleh narasumber yang bernama Tatang Guritno melalui telpon aplikasi *Whatsapp* mengatakan bahwa animo masyarakat terhadap pemberitaan seorang menteri sangatlah tinggi. Mengingat menteri merupakan salah satu jabatan tertinggi di pemerintah serta mengemban kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Semakin tinggi jabatannya maka semakin tinggi animo masyarakat untuk memperhatikan pemberitaan korupsi tersebut.

Sebelum membahas terkait hukuman yang diberikan, penulis berita tersebut menyinggung terkait penangkapan Edhy Prabowo yang diduga melakukan

penyelewengan terhadap ekspor benih lobster yang seringkali disebut benur ini. Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh narasumber yaitu jurnalis Kompas.com yang bernama Tatang Guritno, menyebutkan hal yang perlu ditonjolkan pertama kali adalah penangkapan kemudian langsung masuk ke persidangan.

Seperti dalam berita tersebut, disinggung keterlibatan beberapa orang yang diduga menerima aliran suap ekspor benih lobster. Tak hanya itu, narasumber berpendapat bahwa perilaku dari kesaksian para saksi dalam masa persidangan harus menjadi perhatian oleh para awak media.

Dalam naskah berita itu juga, disebutkan beberapa kutipan wawancara baik dari tersangka Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo akibat penyelewengan ekspor benih lobster. Selain itu terdapat beberapa pihak yang dikaitkan dengan Edhy Prabowo yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi ekspor benih lobster. Namun karena kasus yang masih berlangsung, dalam pemberitaan tersebut KPK masih enggan memberikan pernyataan kepada publik terkait hukuman apa yang akan diberikan kepada Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo.

4.2.2 Konstruksi Realitas Pemberitaan Korupsi Ekspor Benih Lobster

Menteri KKP Edhy Prabowo di Media *Online* CNBC Indonesia

Setiap pemberitaan di media *online* memiliki karakteristik dan sudut pandang yang dikaitkan dengan realitas di masyarakat. Berkaitan dengan yang peneliti paparkan di dalam hasil penelitian. Maka dari itu, seperti yang terdapat dalam penelitian sebelumnya yaitu oleh Atmaja pada tahun 2014 menyebutkan bahwa analisis seleksi isu meliputi 4 konsep yang dianalisis oleh peneliti yaitu

define problem, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation.

Define problem atau pendefinisian masalah yang terdapat dalam berita yang berjudul “Ssst! Gurihnya Uang Triliunan Bisnis Benih Lobster” yang terdapat dalam media CNBC Indonesia adalah meliputi besar potensi uang atau kerugian yang diakibatkan oleh Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo dalam tindak pidana korupsinya itu. Hal ini menjadi sangat menarik seperti apa yang disampaikan oleh narasumber dari Kompas.com yaitu Tatang Guritno yang menerangkan bahwa besar dari penyelewengan Edhy Prabowo sangat perlu diperhatikan oleh masyarakat.

Menurutnya, hal yang menarik untuk ditonjolkan dari sebuah pemberitaan kasus korupsi adalah berapa jumlah dana yang dikorupsi dan berapa jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh sang koruptor. Hal ini bisa menjadi *highlight* dalam sebuah berita karena dapat menarik perhatian masyarakat.

Menurut analisis peneliti, sudut pandang mengenai besaran dana yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi menjadi salah satu sorotan publik mengingat apa yang telah dilakukan oleh Edhy Prabowo yang sudah merugikan negara sampai dengan total triliunan rupiah.

Terdapat dalam naskah berita tersebut, penjelasan awal mengacu pada bisnis ekspor benih lobster yang menjadi sorotan publik setelah terungkapnya tindak pidana korupsi Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo. Dalam hal ini, peneliti menganalisis adanya sebuah masalah dibalik kebijakan yang selama ini ia pegang,

sehingga memungkinkan terjadinya penyelewengan yang menguntungkan pihak tertentu. Bisnis benih lobster memang memiliki nilai jual yang tinggi sehingga sebuah kebijakan pada akhirnya berubah-ubah demi kepentingan sebuah pihak.

Diagnose Causes dalam pemberitaan ini adalah bagaimana sumber masalah dari berita yang membahas bisnis ekspor benih lobster yang juga membahas terkait besar potensi kerugian yang diakibatkan oleh Menteri KKP Edhy Prabowo. Peneliti menganalisis dari hasil observasi naskah beserta pernyataan narasumber dan informan, adalah bagaimana sebuah bisnis yaitu bisnis ekspor benih lobster memiliki nilai jual yang sangat menggiurkan, sehingga Mantan Menteri KKP melakukan sebuah penyelewengan yaitu korupsi ekspor benih lobster. Seperti apa yang disampaikan oleh seorang informan yaitu Ferry Sandi dari CNBC Indonesia menerangkan bahwa penyelewengan ini akibat dari bisnis benih lobster yang memiliki nilai jual menggiurkan serta kebijakan yang berubah-ubah sehingga nilai dari ekspor benih lobster selalu berubah-ubah meskipun nilainya sama-sama tinggi.

Narasumber penelitian yaitu Tatang Guritno yang merupakan wartawan dari Kompas.com menerangkan bahwa sumber masalah dari pemberitaan korupsi adalah salah satunya adalah berapa kerugian yang diakibatkan oleh sang koruptor. Kerugian disini bisa berupa objek yang dijadikan sebagai media untuk tindak pidana korupsi yaitu benih lobster. Edhy Prabowo membuat benih lobster menjadi sorotan masyarakat. Dalam hal ini, narasumber mengatakan aliran dana yang dikorupsi juga dipertanyakan untuk bisa menjawab rasa penasaran masyarakat.

Peneliti menganalisis bahwa berdasarkan naskah berita yang dipublikasikan oleh media CNBC Indonesia ini menyebutkan bahwa nilai dari ekspor benih lobster

yang merangkak naik setelah adanya pelarangan yang diputuskan oleh menteri KKP sebelumnya. Kemudian setelah dibuka kembali, nilai ekspor benih lobster mulai meningkat kembali dari bulan ke bulan di tahun 2020.

Berkaitan dengan kebijakan ekspor benih lobster, terdapat dalam berita tersebut kebijakan larangan ekspor benih lobster yang sebelumnya dibuat oleh Menteri KKP sebelumnya yaitu Susi Pudjiastuti Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016, tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia dikarenakan hanya menguntungkan negara lain dibandingkan negara Indonesia. Maka dengan adanya pencabutan larangan ini, peneliti menganalisis bahwa hal ini mengundang adanya kecurigaan dari perubahan kebijakan tersebut. Maka dari itu, perubahan kebijakan ini dijelaskan dan menjadi sumber masalah di pemberitaan yang dipublikasikan oleh media *online* CNBC Indonesia.

Make moral judgement merupakan nilai moral dari sebuah berita yang dapat diambil dari pemberitaan yang dipublikasikan oleh CNBC Indonesia adalah dorongan kepada khalayak atau pembaca untuk tetap memperhatikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah khususnya ekspor benih lobster yang memiliki nilai ekspor yang sangat tinggi sehingga rawan terjadi penyelewengan. Peneliti menganalisis bahwa pejabat pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan harus mempertimbangkan segala aspek dan tidak mementingkan satu pihak saja apalagi hal yang menyangkut ekspor benih lobster berkaitan langsung dengan ekosistem.

Bisnis ekspor benih lobster tidak hanya menyangkut perekonomian dan bisnis saja akan tetapi juga ekosistem karena jika terlalu banyak dilakukan ekspor

maka negara tidak akan memiliki keuntungan dalam budidaya lobster yang tentu nilainya lebih tinggi dari bisnis benih lobster. Maka dengan adanya pemberitaan ini, mampu memberikan perhatian kepada kebijakan pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang bisa menguntungkan negara.

Narasumber dari media *online* Kompas.com yaitu Tatang Guritno menyebutkan seseorang yang dipercaya memegang sebuah jabatan harus dapat bertanggung jawab terhadap jabatan yang ia pegang. Tindak korupsi benih lobster ini mengundang animo masyarakat yang tinggi apalagi terkait kerugian yang diakibatkan oleh Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo ini. Isu korupsi menjadi suatu berita hangat di masyarakat, yang mengundang beragam reaksi.

Treatment Recommendation yaitu penekanan penyelesaian yang disebutkan dalam naskah berita yang dipublikasikan oleh CNBC Indonesia ini, peneliti menganalisis bahwa disebutkan didalamnya terdapat perkiraan aliran dana penyelundupan benih lobster ke luar negeri. Dengan adanya pemberitaan ini, terungkap sudah berapa kisaran dana yang diselundupkan. Informasi dana yang diselundupkan ini diambil badan resmi yaitu PPATK dimana sumber yang diambil merupakan sumber yang kredibel.

Sementara, Tatang Guritno yaitu narasumber dari Kompas.com yang diwawancarai pada tanggal 4 September 2021 menerangkan bahwa kerugian yang dialami negara beserta total dana yang dikorupsi merupakan dua hal yang berbeda. Maka perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait hal ini. Tak hanya itu, beberapa orang yang menerima aliran dana korupsi juga perlu menjadi perhatian, agar pelaku tindak pidana korupsi lainnya bisa diproses secara hukum.

Dalam pemberitaan yang berjudul “Ssst! Gurihnya Uang Triliunan Bisnis Benih Lobster” yang dipublikasikan oleh media *online* CNBC Indonesia memiliki beberapa aspek yang ditonjolkan dalam pemberitaan tersebut.

Tak hanya itu, di dalam pemberitaan menyinggung terkait perubahan kebijakan serta perubahan nilai ekspor bisnis benih lobster yang semakin dirasa menggiurkan dan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, penggunaan gambar dirasa lebih menjelaskan apa isi berita tersebut, karena pada pemberitaan tersebut menggunakan gambar seorang pengelola benih lobster dengan beberapa benih lobster yang terlihat dengan jelas.

Menurut narasumber yang bernama Tatang Guritno yang diwawancarai pada tanggal 4 September 2021 menyebutkan bahwa hal yang paling harus ditonjolkan nomor satu adalah berapa jumlah kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut, serta kemana saja aliran dana korupsi tersebut mengalir. Menurut narasumber jumlah dana yang dikorupsi dan jumlah kerugian dari tindak korupsi adalah hal yang berbeda, maka dari itu sangat perlu bagi para insan pers untuk menyelidiki secara jeli terkait tindak pidana korupsi.

Peneliti menganalisis bahwa pemberitaan ini berpengaruh besar terhadap pengetahuan masyarakat mengenai apa yang menjadi objek yang dikorupsi oleh terpidana korupsi Edhy Prabowo. Melalui pemberitaan ini, masyarakat lebih tau dan lebih memperhatikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah kedepannya agar tidak terjadi kembali penyelewengan yang menyebabkan kerugian negara. Dengan ditunjukkannya beberapa kenaikan harga dari bulan ke bulan menyebutkan bahwa perubahan harga bisnis lobster memiliki nilai yang sangat labil. Meskipun labil,

perubahan kenaikan harga ini cenderung meningkat sehingga memungkinkan adanya bisnis besar di dalamnya. Maka dari itu diperlukan peraturan atau kebijakan yang tidak hanya menguntungkan sebelah pihak, namun harus menguntungkan negara serta tidak merusak ekosistem yang ada.

Selain itu, peneliti menganalisis bahwa berkaitan dengan konsep pemberitaan di CNBC Indonesia yang merupakan media yang membahas hal-hal yang menyangkut perekonomian di Indonesia, maka dari itu CNBC mempublikasikan pemberitaan mengenai bisnis benih lobster serta menampilkan informasi yang didapatkan dari PPATK dan BPS.

Bagan 4.1 Analisis Framing Pemberitaan Korupsi Edhy Prabowo di Media *Online* Pikiran Rakyat dan CNBC Indonesia

